

## STUDI EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ( PUSKESOS ) LANGEN LESTARI DI DESA KLANGENAN

<sup>1)</sup> Iman Roeslan, <sup>2)</sup> Rochmat Hidayat, <sup>3)</sup> Agus Rianto  
Universitas Muhammadiyah Cirebon

<sup>1)</sup>[ruslaniman06@gmail.com](mailto:ruslaniman06@gmail.com) <sup>2)</sup>[rochmat.hidayat@umc.ac.id](mailto:rochmat.hidayat@umc.ac.id), <sup>3)</sup>[agus\\_rianto@umc.ac.id](mailto:agus_rianto@umc.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kelembagaan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Langen Lestari di Desa Klangeran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, artikel, dan sumber-sumber literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah dengan hadirnya Lembaga yang bernama Puskesos akan membantu Pemerintah Desa khususnya untuk menjadi wadah pengaduan persoalan kemiskinan masyarakat, menerima keluhan, memberikan penanganan dan rujukan program bantuan, menjadi data base aduan perihal kesejahteraan sosial kemasyarakatan, serta menjadi perantara pemberian bantuan khususnya di wilayah Desa Klangeran.

**Kata Kunci : Efektivitas, Kelembagaan, Pusat kesejahteraan Sosial, Sistem layanan Terpadu**

### Abstract

*This study aims to determine the institutional effectiveness of the Langen Lestari Social Welfare Center (Puskesos) in Klangeran Village. This study uses descriptive qualitative research methods. Primary data in this study were obtained from interviews. Meanwhile, secondary data were obtained from documents, articles, and literature sources related to this research. The results of this study are that the presence of an institution called Puskesos will help the Village Government in particular to become a forum for complaints about community poverty issues, receive complaints, provide handling and referrals for assistance programs, become a data base for complaints regarding social welfare, and become an intermediary for providing assistance, especially in rural areas. Klangeran Village area.*

**Keywords: Effectiveness, Institutional, Social Welfare Center, Integrated Service System**

## INTRODUCTION/ PENDAHULUAN

Desa sebagai unit pemerintahan terbawah saat ini menjadi ujung tombak realisasi hampir seluruh program pemerintah, khususnya program yang berhubungan dengan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Beberapa program berskala nasional yang dijalankan di desa untuk mendukung upaya tersebut antara lain program bantuan sosial pangan yang terdiri dari Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang saat ini bernama Program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Sehat (PIS) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta Program Listrik bagi masyarakat miskin. Dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat selain harus terarah dan berkelanjutan, juga harus terpadu.

Dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS, Kementrian Sosial telah memiliki beberapa program prioritas yang ditunjukkan untuk membantu perbaikan tata kelola pemerintahan. Melihat program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu masih bersifat sektoral sehingga mengakibatkan penanganan fakir miskin kurang efektif dan efisien maka diperlukan sinergitas, peningkatan akses, dan integrasi layanan melalui sistem layanan dan rujukan terpadu sehingga Menteri sosial perlu menetapkan tentang sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Maka kementrian sosial memutuskan mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (selanjutnya disebut SLRT) dibentuk bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin serta orang tidak mampu, meningkatkan akses layanan penanganan fakir miskin dan orang tidak

mampu, mengintegrasikan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, mendukung perluasan jangkauan pelayanan dasar, dan mendukung verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang yang tidak mampu secara dinamis di daerah. Sistem layanan dan rujukan terpadu juga berfungsi untuk, mengintegrasikan informasi, data, dan layanan, mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta, melakukan rujukan, mencatat kepesertaan dan kebutuhan program, mendukung penerapan SPM, dan membantu melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu melalui SIKS-NG. dan dengan turunan dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu kemudia Pemerintah Kabupaten Cirebon mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan sistem layanan dan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten Cirebon.

Pusat Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut puskesmas) menjadi salah satu langkah awal menuju tercapainya pelayanan yang berkualitas, komperhensif, dan partisipatif. Dalam Narasi RPJMN 2020-2024, pada 2024 diproyeksikan persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan SLRT untuk penanggulanagn kemiskinan mencapai 100 (seratus) persen. Sehingga ke depan, SLRT dan Puskesmas dapat memberikan pelayanan yang inklusif dan bermutu guna menjamin keberlanjutan dan pengembangan SLRT dan Puskeos. Dan di sini peran Puskesmas sangat dibutuhkan dalam Pemerintahan Desa tak terkecuali Pemerintahan Desa Klenganan Puskesmas hadir sebagai jembatan aspirasi warga yang lebih spesifik di bidang social. Puskesmas diberikan kewenangan untuk mengolah data di tingkat desa baik data yang umum yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial maupun data-data yang lainnya yang sangat wajib dipegang untuk dijadikan pedoman Puskesmas menyampaikan aspirasi warga yang belum tercover bantuan sosial sehingga Puskesmas dengan kewenangannya bisa membantu warga yang benar-benar membutuhkan untuk mendapatkan bantuan PKH misalnya bagi yang

memiliki anak usia dini dan anak yang masih bersekolah, bantuan sembako bagi warga yang terdampak di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang setiap bulannya mendapat bantuan beras, telur, sayur, dan buah-buahan. Bisa juga bantuan kesehatan yaitu Kartu Indonesia Sehat baik dari sumber anggaran nasional maupun Kartu Indonesia yang berasal dari anggaran daerah dan bantuan-bantuan sosial lainnya, dimana setelah Penulis melakukan Observasi awal di Desa Klungenan khususnya di Pusat Kesejahteraan Sosial Langen Lestari Penulis melakukan wawancara, penulis melihat aktivitas Pelayanan dan peran yang dilakukan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial Desa Klungenan Kecamatan Klungenan Kabupaten Cirebon dapat berjalan baik dan bermanfaat.

### **RESEARCH METHOD/ METODE PENELITIAN**

Dalam banyak literatur teoritis baik bahasa Inggris maupun Indonesia, istilah “kelembagaan” (social institution) selalu disandingkan dengan “organisasi” (social organization). Kedua kata ini sering sekali menimbulkan perdebatan di antara para ahli. Kata kelembagaan menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (established) yang hidup (constituted) di dalam masyarakat. Suatu kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku (ways) yang hidup pada suatu kelompok orang. Ia merupakan sesuatu yang stabil, mantap, dan berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern atau bisa berbentuk tradisional dan modern; dan berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial. Tiap kelembagaan memiliki tujuan tertentu, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki pola perilaku tertentu serta nilai-nilai dan norma yang sudah disepakati yang sifatnya khas. Kelembagaan adalah kelompok-kelompok sosial yang menjalankan masyarakat.

Tiap kelembagaan dibangun untuk satu fungsi tertentu. Karena itu kita mengenal kelembagaan pendidikan, kelembagaan-kelembagaan di bidang ekonomi, agama, sosial, dan lain-lain. Jadi, dunia berisi kelembagaan-kelembagaan. Semua manusia pasti masuk dalam kelembagaan. Tidak satu, tapi sekaligus dalam banyak kelembagaan, mulai dari rumah,

di sekolah, di tempat kerja, di tempat ibadah, dan lain-lain.

Secara sederhana, sesuatu sosial relation dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan apabila memiliki tiga komponen, yaitu adanya:

1. Komponen person. Orang-orang yang terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.
2. Komponen aturan dan aturan. Setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.
3. Komponen struktur. Setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalkannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-ubah posisi dengan kemauan sendiri.

Analisis kelembagaan pada prinsipnya adalah menggunakan aspek-aspek kultural dan structural dalam memahami sebuah kelembagaan, karena setiap kelembagaan memuat kedua aspek tersebut sekaligus. Analisis kelembagaan pada Pusat kesejahteraan sosial dilakukan pada tiga level, yaitu :

1. Level superstruktur, yaitu mempelajari berbagai aturan dan kebijakan yang diciptakan pemerintah desa serta kondisi sosial dan lingkungan alam memiliki pengaruh kepada bagaimana berjalannya sebuah kelembagaan/organisasi
2. Level desa, yaitu mempelajari karakteristik sosial ekonomi masyarakat dimana kelembagaan tersebut hidup. Hal ini dipelajari melalui “Community Profile”
3. Level internal kelembagaan, yaitu mempelajari secara mendalam kondisi dan keberadaan kelembagaan yang ada di desa satu per satu. Hal ini dipelajari melalui kuesioner “Organizational Profile”, dimana satu kuesioner untuk tiap kelembagaan.

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu Eksistensi Pusat Kesejahteraan Sosial Langen Lestari dalam

melayani permasalahan kesejahteraan sosial Masyarakat Desa Klungenan Kecamatan Klungenan Kabupaten Cirebon, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 2005:63). Menurut Moleong Lexy J (2009:16), metode kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam menjawab mengenai rumusan masalah, dalam hal ini yaitu bagaimana eksistensi kelembagaan Pusat Kesejahteraan Sosial sebagai unit Pemerintahan Desa Klungenan

## **RESULTS AND DISCUSSION/ HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fungsi pertama dari Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesmas adalah menjadi wadah pengaduan persoalan kemiskinan masyarakat. Pengaduan tersebut nantinya akan mendapatkan penanganan dan masyarakat bisa mendapatkan rujukan program apa yang bisa mengentaskan dan membantu persoalan ekonominya. Maka bisa disimpulkan Pemerintah Desa harus berusaha semaksimal mungkin agar Lembaga Puskesmas ini terus eksis baik keberadaannya maupun kebermanfaatannya dengan kuasa anggaran melalui anggaran Dana Desa Pemerintah Desa bisa mengoptimalkan peran Puskesmas juga di tengah masyarakat.

Konsep eksistensi dalam suatu lembaga sosial menunjukkan pada tingkatan sejauh mana lembaga tersebut melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsinya, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan secara optimal komponen-komponen kelembagaan. Kegiatan atau program yang dilakukan oleh suatu lembaga dapat dikatakan eksis apabila keberadaannya bermanfaat untuk sekitar untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Eksistensi terdapat komponen untuk mencapai tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Sumber daya, syarat dan tata cara pembentukan, standar kualifikasi, pengembangan kapasitas pengurus lembaga.
- b. Penyelenggaraan roda kelembagaan, sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh lembaga, serta tujuan penyelenggaraan lembaga puskesmas.
- c. Formalitas pengurus lembaga puskesmas dalam menjalankan perannya, dan koordinasi dengan pemerintah desa untuk saling bersinergi
- d. Fungsi pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dan penanganan keluhan dan rujukan program sosial.

Pada lembaga sosial yang keberadaannya dibentuk untuk menjadi wadah pengaduan persoalan kemiskinan masyarakat, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi warga miskin maka puskesmas harus memiliki komponen kelembagaan yang menjadi senjata agar puskesmas ini menjadi eksis seperti,

1. Sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat (Hasibuan, 2016). Sumber daya manusia yang berkompeten yang diawali dari syarat dan tata cara pembentukan puskesmas yang profesional, standar kualifikasi yang tinggi untuk penyelenggara puskesmas, hingga adanya pengembangan kapasitas penyelenggara puskesmas,
2. Mekanisme kelembagaan yang baik yaitu terdiri dari penyelenggaraan roda organisasi puskesmas yang profesional, berintegritas, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan Puskesmas berlandaskan pada asas penyelenggaraan yang merujuk pada Pedoman Umum Pelaksanaan SLRT dan Puskesmas Tahun 2020 Kementerian Sosial Republik Indonesia
3. Struktur organisasi yang terstruktur dengan formasi penyelenggara puskesmas yang baik dapat menjadi landasan lembaga puskesmas dapat terus eksis memberikan manfaat, serta hak dan tanggung jawab yang telah diatur oleh Pemerintah Desa dengan tujuan agar penyelenggara puskesmas berjalan baik antara hak dan kewajiban. Serta harus dievaluasi secara berkala mengenai koordinasi antara Penyelenggara Puskesmas dan Penyelenggara

Pemerintah Desa demi tujuan yang baik dan terus eksisnya Puskesmas di tengah masyarakat.

4. Dan Fungsi pelayanan Puskesmas Langen Sari yang memberikan solusi dan edukasi kepada masyarakat mengenai permasalahan sosial dan program perlindungan sosial yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang merujuk pada Pedoman Umum Pelaksanaan SLRT dan Puskesmas Tahun 2020 Kementerian Sosial Republik Indonesia dan program perlindungan sosial yang bisa diakses untuk membantu kepentingan masyarakat desa klangenan dirasa maksimal dan begitu bermanfaat yang utama adalah program kartu Indonesia sehat, program kartu Indonesia pintar, dan yang lainnya

#### CONCLUSION/ KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa eksistensi puskesmas langen lestari di desa klangenan bisa dikatakan eksis karena dengan hadirnya puskesmas langen lestari desa klangenan telah dirasa manfaatnya bagi masyarakat klangenan yang khususnya memiliki masalah kesejahteraan sosial dan juga eksistensi puskesmas itu dapat dideskripsikan dengan begitu banyak masyarakat yang terbantu dengan seperti program-program bantuan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan yang dapat dilihat kesimpulan dari sisi fokus penelitian adalah :

1. Sumber daya manusia penyelenggara puskesmas langen lestari desa klangenan saat ini yang sudah baik dan berkompeten dalam menjalankan peran dan fungsinya baik dilihat dari standar kualifikasi penyelenggara puskesmas maupun kapasitas pengurus puskesmas saat ini.
2. Mekanisme kelembagaan puskesmas langen lestari saat ini sudah berjalan dengan baik dan semoga kedepannya perlu ditingkatkan lagi baik dari roda organisasinya, sarana prasarana yang ada dan kebermanfaatannya sehingga tujuan utama dari penyelenggaraan puskesmas dapat tercapai.
3. Struktur organisasi puskesmas langen lestari ini sudah baik dengan formasi yang ada

pada penyelenggara puskesmas, hak dan tanggung jawab puskesmas yang berjalan sesuai aturan dan koordinasi puskesmas dengan pemerintah desa yang baik akan menciptakan kolaborasi pelayanan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial tingkat desa.

4. Fungsi pelayanan adalah aksi lapangan yang bisa dilaksanakan oleh puskesmas langen lestari ini sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang diberikan informasi program yang akurat serta akuntabel dan jangkauan program yang menyeluruh dan diselesaikan dengan penanganan keluhan dan rujukan program sosial yang kerjakan oleh puskesmas langen lestari desa klangenan kurang lebihnya akan menjadi penilaian atas eksistensi pusat kesejahteraan sosial langen lestari desa klangenan.

#### REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Suwardi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008. Hlm. 188
- David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik Penerbit Nusa Media Bandung 2019*
- Fahrudin, Adi, 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung PT Refika Aditama*
- Fredian Tonny Nasdian *Sosiologi Umum (ed.);.1 – Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015*
- Fuad, Anis, dan Kandung Supto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Moleong, J Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosda Karya
- Prof. Dr. Agus Suryono, S.U. *Teori dan Strategi Perubahan Sosial Penerbit Bumi Aksara Jakarta 2020*
- Soeharto Edi. 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Penerbit PT Refika Aditama*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian*

*Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*  
Bandung : Alfabeta.